

THE SME DEVELOPMENT BASED ON LEADING COMMODITIES

Tri Kurniawati¹⁾

Etty Puji Lestari¹⁾

E-mail : nuning@ut.ac.id

ettypl@ut.ac.id

¹⁾Lecturer at Faculty of Economics
Open University of Indonesia

ABSTRACT

SMEs have an important role in economy, especially in Indonesia. Some indicator data of macroeconomic indicates that SMEs have a major contribution to economic growth. Along with the development of regional economy, many problem found by local governments in developing SMEs, both internal and external. Comprehensive study was conducted to get the policy and recommendation for stakeholders to be able to increased in developing SMEs. This research examines the development of SMEs based on leading commodity in Nabire.

The methods using Analytic Hierarchy Process (AHP) to see the leading commodity featured in various sectors for development. It refers to the OTOP program, which quite successful in developing SMEs in Thailand. The results of the study indicate there are at least five major factors to consider in the development of SMEs. They are access to distribution networks or markets, limited capital, flexibility of pricing, training and accessibility of capital. Meanwhile, sub sector priorities to be developed are citrus plantation, cocoa plantations, rice and soybeans, small furniture industry and regional trade.

Keywords: *SME, Leading Commodity, Analytic Hierarchy Process*

ABSTRAK

UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian, khususnya di Indonesia. Beberapa data indikator ekonomi makro menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah, banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM yang berasal dari internal dan eksternal. Untuk itu dilakukan pengkajian yang komprehensif agar bisa memberikan informasi dan rekomendasi yang tepat bagi para stakeholder untuk dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengembangkan UMKM.

Penelitian ini ingin mengkaji pengembangan komoditas unggulan UMKM di Kabupaten Nabire.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk melihat komoditas unggulan di berbagai sektor cocok untuk dikembangkan. Metode ini mengacu pada metode yang dikembangkan Thailand melalui program OTOP, yang cukup sukses dalam mengembangkan UMKM di Thailand. Hasil kajian menunjukkan setidaknya terdapat lima faktor utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM yaitu jaringan distribusi atau akses pasar, kebutuhan modal kerja, keleluasaan menetapkan harga, pelatihan dan aksesibilitas modal. Sementara itu subsektor prioritas pada tingkat kabupaten yang perlu dikembangkan adalah perkebunan jeruk, perkebunan coklat, tanaman padi dan kedelai, industri kecil mebel dan perdagangan.

Kata Kunci : *UMKM, Komoditas Unggulan, Analytic Hierarchy Process*

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 2007 menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Penurunan ini bukan saja berakar pada kelemahan pada sektor moneter, namun juga diakibatkan lemahnya struktur ekonomi riil menghadapi gejolak dari luar dan dalam (*external and internal shock*). Sebelum krisis prioritas industri lebih ke industri hulu dan mengabaikan industri hilir karena diasumsikan jika industri hulu terbangun maka industri hilir akan mengikuti. Kenyataannya ketika krisis justru industri hulu terkena dampak yang signifikan.

Secara umum industri besar rawan terhadap gejolak dari luar karena tidak memiliki keterkaitan yang kuat baik kebelakang berupa penyediaan input (*backward linkage*) maupun kedepan (*forward linkage*). Terlambatnya promosi usaha kecil dan menengah (UKM) dalam program membangun industri hilir

dan keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan usaha besar berakibat peran yang menonjol pada usaha besar. Dengan demikian terjadi kepincangan yang cukup parah ketika krisis melanda. Industri besar menghadapi masalah serius dalam krisis ekonomi sedangkan UKM mampu menghadapi krisis tersebut. UKM bertahan karena menggunakan bahan baku lokal, pemakaian tenaga kerja dengan upah yang rendah, mampu menyesuaikan persediaan bahan baku dan berorientasi pasar.

Beberapa faktor diatas menempatkan UKM sebagai usaha yang memiliki keunggulan daya saing dan dinamika dalam pertumbuhan ekonomi. Para ahli juga berpendapat bahwa proses pemulihan ekonomi yang ditunjang oleh meningkatnya peran UKM secara signifikan. Hal ini menjadi bukti bahwa potensi UKM dalam pemulihan krisis ekonomi, yang muncul akibat kemampuannya untuk secara cepat mengubah dan

mengalihkan pasar input outputnya dari input yang mahal pada input yang lebih murah menunjukkan bahwa UKM memiliki peran

strategis dalam ekonomi suatu negara.

Tabel 1. Perkembangan UKM dan Usaha Besar Tahun 2008-2009

No.	Indikator	satuan	2008		2009		Perkembangan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Unit Usaha								
1	UMKM	unit	51409612	99,99	52764603	99,99	1354991	2,64
2	Usaha besar	unit	4650	0,01	4677	0,01	27	0,58
Tenaga kerja								
1	UMKM	orang	94024278	97,15	96211332	97,30	2187054	2,33
2	Usaha besar	orang	2756205	2,85	2674671	2,70	(81534)	(2,96)
PDB								
1	UMKM	milyar	2613226,1	55,67	2993151	56,53	379925,7	14,54
2	Usaha besar	milyar	2080582,9	44,33	2301709	43,47	221126,2	10,63

Sumber : Departemen Koperasi, 2012

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa dari sisi unit usaha jumlah UKM di Indonesia sangat besar, bahkan hampir semua usaha terdiri dari usaha mikro kecil dan menengah, sebaliknya jumlah usaha besar hanya memberi kontribusi kurang dari dua persen. Sementara itu dari sisi penyerapan tenaga kerja, hampir 97 persen tenaga kerja terserap di sektor UKM, sisanya bekerja pada industri skala besar. Dilihat dari kontribusi terhadap PDB maka lebih dari separuh PDB disumbang oleh industri kecil dan menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan UKM untuk memperkokoh perekonomian semakin kuat.

Perkembangan UKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UKM. Permasalahan klasik yang dihadapi yaitu rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal yang dihadapi UKM yaitu: rendahnya kualitas SDM UKM

dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UKM, dan terbatasnya akses UKM terhadap permodalan, informasi, teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung dan kelangkaan bahan baku. Juga yang menyangkut perolehan legalitas formal yang hingga saat ini masih merupakan persoalan mendasar bagi UMKM di Indonesia, menyusul tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan (Depkop, 2011). Koperasi dan UKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

Artikel ini ingin mengkaji pengembangan UKM yang didasarkan komoditas unggulan di

berbagai sektor cocok untuk dikembangkan. Metode yang digunakan adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang mengacu pada metode yang dikembangkan di Thailand melalui program OTOP, yang cukup sukses dalam mengembangkan UMKM di Thailand. Sementara sampel yang digunakan adalah kabupaten Nabire, Papua Barat. Dengan metode ini maka pemerintah daerah dapat menetapkan program yang lebih fokus untuk mengembangkan komoditas unggulan tertentu di suatu Kabupaten/Kota, sehingga tercipta lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan komoditas unggulan ini dapat menggerakkan komoditas-komoditas lain karena bekerjanya mekanisme *backward linkages* maupun *forward linkages*. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi secara umum akan meningkat.

METODE ANALISIS

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Pada dasarnya AHP adalah metode yang memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya dan mengatur kelompok-kelompok tersebut ke dalam suatu hirarkhi. Selanjutnya akan memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif dan akhirnya dengan suatu sintesa ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi. Prinsip metode AHP adalah memberikan bobot tiap faktor,

variabel, dan indikator dengan perbandingan antar faktor, variabel, indikator satu dengan lainnya. Bobot yang lebih besar dari suatu indikator, menunjukkan indikator yang lebih penting dibandingkan indikator lainnya dalam menentukan KPJU unggulan suatu daerah.

Dalam proses AHP ini dilakukan 3 tahap utama yaitu pembobotan, klasifikasi intensitas tiap indikator dan penentuan nilai intensitas tiap indikator dan peringkat (Bappeda Nabire, 2011).

1. Pembobotan terhadap faktor, variabel dan indikator, dilakukan oleh 15 orang *stakeholders* (responden) di tingkat kabupaten dengan menggunakan kuesioner AHP.
2. Langkah pertama yang digunakan adalah pembobotan untuk tujuan. Pembobotan tujuan ini berguna untuk mengetahui faktor apa yang menjadi prioritas tujuan dalam melakukan penguatan UKM. Secara umum, penguatan UKM di suatu daerah memiliki tiga tujuan utama yaitu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing.
3. Pembobotan berikutnya adalah pembobotan kriteria. Pembobotan kriteria dimaksudkan untuk menetapkan kriteria yang akan digunakan dalam pengembangan UKM di Kabupaten Nabire.
4. Matriks bobot sektor/sub sektor setiap distrik sampel. Matriks bobot sektor/sub sektor untuk setiap distrik yang digunakan sebagai sampel ditujukan untuk melihat persepsi para *stakeholders* di tingkat

Kabupaten Nabire mengenai kondisi sektor/subsector di masing-masing distrik. Bobot yang lebih besar menunjukkan bahwa sektor/sub sektor tersebut lebih potensial dibandingkan sektor yang lain.

5. Pembobotan juga dilakukan di 6 Distrik yaitu Nabire Barat, Teluk Kimi, Nabire, Makimi, Uwapa, Wanggar.
6. Matriks bobot sektor/sub sektor untuk setiap distrik yang digunakan sebagai sampel ditujukan untuk melihat persepsi para stakeholders di tingkat distrik mengenai kondisi sektor/subsektor di distrik masing-masing
7. Hasil pembobotan responden diperoleh dengan rata-rata geometris sehingga menghasilkan satu bobot yang sama.
8. Klasifikasi intensitas tiap indikator. Sebelum diolah dengan *software expert choice*, setiap indikator baik yang berasal dari data primer maupun sekunder diklasifikasikan untuk memperoleh intensitas masing-masing. Data-data primer yang diperoleh dari kuesioner persepsi responden diolah dengan bantuan SPSS atau Microsoft Excell sehingga diperoleh tabulasi yang menunjukkan intensitas tiap-tiap indikator berdasarkan pemeringkatan. Intensitas tersebut berupa skala *likert* 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan ukuran dari kondisi yang paling buruk sampai kondisi yang paling baik. Indikator-indikator kuantitatif berupa data sekunder (*existing*

statistics data), masing masing juga diklasifikasikan dengan menggunakan ‘metode rata rata’ dan ‘metode distribusi’ sehingga diperoleh intensitasnya ke dalam skala likert yang sama.

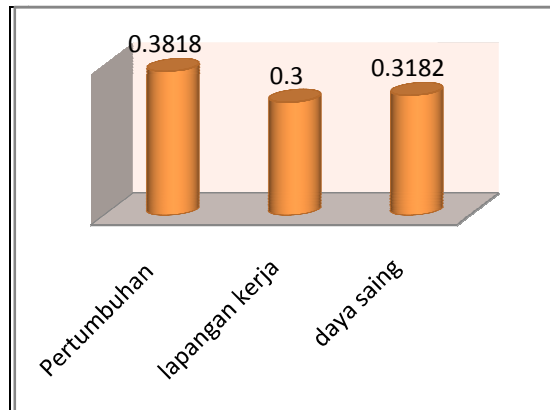
Daftar intensitas indikator-indikator yang berasal hasil olahan data primer berupa persepsi pelaku usaha tersebut di atas, dijadikan bahan masukan bagi peneliti untuk memperoleh intensitas akhir setiap indikator. Keputusan akhir atas intensitas setiap indikator dari panelis inilah yang selanjutnya akan diolah dengan menggunakan perangkat lunak ‘*expert choice*’ untuk mendapatkan nilai intensitas tiap indikator dan peringkat KPJU unggulan di tingkat Kabupaten.

9. Penentuan nilai intensitas tiap indikator dan peringkat. Intensitas masing masing indikator kemudian dimasukkan ke dalam data base perangkat lunak ‘*expert choice*’ berdasar hirarki dan bobot pemeringkatan yang telah ditentukan sebelumnya. Olahan perangkat lunak tersebut menghasilkan nilai masing masing indikator yang secara kumulatif membentuk urutan peringkat nilai dari yang tertinggi sampai yang terendah.

HASIL ANALISIS

Berdasarkan hasil kuesioner, FGD dan *indepth interview* diketahui bahwa pengembangan UMKM di Nabire diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja. Rata-rata bobot tujuan

pengembangan UMKM terbesar adalah pertumbuhan ekonomi (Gambar 1).



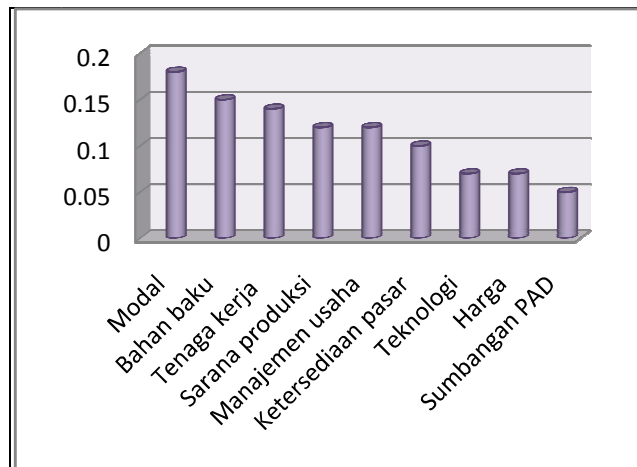
Gambar 1. Hasil Pembobotan AHP Tujuan Pengembangan UMKM

Hasil kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah prioritas utama dalam persepsi responden karena pertumbuhan ekonomi dipandang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Responden melihat bahwa tujuan usaha baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, maupun jasa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Prioritas kedua secara rata-rata adalah peningkatan daya saing (rata-rata bobot 0,3182).

Ranking terakhir yang dipilih oleh responden penciptaan lapangan kerja (bobot rata-rata 0,3000). Bobot ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tetap harus memperhatikan penciptaan lapangan kerja. Selisih bobot antar tujuan yang tidak terlalu besar menunjukkan bahwa sebenarnya para pelaku usaha

dan pemangku kepentingan menganggap bahwa tiga tujuan pengembangan UMKM ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Ketiga tujuan ini harus mendapat perhatian dalam pengembangan UMKM terutama setelah KPJU unggulan terpilih (Bappeda Nabire, 2011).

Pengembangan UMKM tidak terlepas dari hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Secara umum permasalahan pengembangan UMKM terkait dengan permasalahan ketrampilan, manajemen usaha, permodalan, ketersediaan bahan baku, ketersediaan pasar, kemampuan mengadopsi teknologi dan lain-lain. Hasil kuesioner, *indepth interview* dan FGD menunjukkan hasil urutan berdasarkan tingkat kepentingan yang harus diperhatikan seperti Gambar 2.



Gambar 2. Hasil Pembobotan AHP
Kriteria Pengembangan UMKM

Berdasarkan persepsi responden, hal utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM di Nabire adalah modal. Permodalan dipandang menjadi masalah yang paling penting untuk diperhatikan karena sebagian besar responden merasakan kesulitan mendapatkan modal. Bahan baku merupakan hal kedua yang dianggap penting untuk diperhatikan dalam pengembangan UMKM.

Menurut responden, aspek tenaga kerja merupakan aspek yang penting dalam pengembangan UMKM. Masalah tenaga kerja yang disoroti bukan dari sisi penciptaan lapangan kerja namun lebih dari sisi ketrampilan. Distrik Nabire Barat menyatakan keinginan untuk memanfaatkan balai latihan ketrampilan yang selama ini tidak berfungsi untuk mengembangkan ketrampilan SDM. Ketrampilan SDM yang bersifat kebiasaan dan diperoleh secara *learning by doing* maupun dilakukan karena telah bersifat turun temurun, dianggap menyebabkan hasil usaha terutama kerajinan tidak dapat berkembang optimal dan memiliki daya saing yang baik.

Sarana produksi/usaha ternyata menjadi masalah yang dianggap penting

terutama di Distrik Nabire Barat, Wanggar, dan Makimi. Sarana produksi tidak hanya menyangkut faktor-faktor pendukung usaha (misalnya pestisida, pupuk bagi usaha pertanian) namun terutama menyangkut infrastruktur jalan produksi. Seperti permasalahan tradisional UKM di seluruh Indonesia adalah tidak adanya manajemen usaha yang bagus. Ketersediaan pasar dipandang menjadi faktor yang penting dalam pengembangan UKM. Tanpa adanya pasar, maka usaha yang dijalankan tidak akan berkembang dengan baik (Bappeda Nabire, 2011).

Secara lebih rinci pembobotan tujuan pengembangan UKM yang dilakukan oleh para stakeholders menunjukkan bahwa untuk variabel tenaga kerja, faktor yang dipandang paling penting adalah pelatihan kemudian diikuti dengan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Para stakeholders menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Nabire perlu membuat lebih banyak pelatihan untuk pengembangan UKM, karena tenaga terampil merupakan salah satu hal utama dalam mengembangkan UKM.

Sedangkan dari sisi bahan baku, para stakeholders melihat bahwa yang

paling perlu dikembangkan di Kabupaten Nabire adalah adanya kesinambungan penyediaan bahan baku. Hal ini menggambarkan *networking* bahan baku. Hal berikutnya yang penting adalah ketersediaan, harga bahan baku dan terakhir adalah mutu bahan baku. Untuk meningkatkan jejaring, tentu saja pengusaha tidak dapat melakukannya sendiri, pemerintah harus memiliki fungsi sebagai pemampu (*enabler*) dan pemrakarsa.

Hal lain yang patut mendapat perhatian dalam pengembangan UKM adalah permodalan, baik dari sisi kebutuhan modal kerja, aksesibilitas modal dan kebutuhan awal investasi. Pemerintah kabupaten Nabire perlu mengadakan kerjasama yang lebih mendalam dengan perbankan. Kerjasama seyogyanya tidak hanya bersifat insidental, namun merupakan program yang dimasukkan dalam

rencana pembangunan. Hal ini perlu mendapat perhatian serius karena pengembangan UMKM tidak dapat terlepas dari permodalan. Dalam pengembangan permodalan sendiri dibutuhkan skema untuk modal kerja dan investasi dengan tata kelola yang berbeda.

Pengembangan UKM juga perlu memperhatikan ketersediaan sarana produksi, kemudahan untuk mendapatkan saran produksi tersebut dan harga sarana produksi. Sedangkan permasalahan yang perlu disiapkan untuk faktor teknologi adalah kesiapan mengadopsi teknologi baru dan kemudahan mendapatkan teknologi tersebut. Hal ini disebabkan karena menurut para stakeholders, sebagian besar UKM masih menggunakan teknologi yang relatif tradisional. Peran pemerintah kembali diperlukan untuk mengembangkan faktor teknologi ini.

Tabel 2. Hasil Pembobotan AHP Tujuan Pengembangan UMKM

Variabel	Bobot Variabel	Indikator	Bobot Indikator
Tenaga kerja	0,14	Tingkat pendidikan	0.04
		Pelatihan	0.065
		Pengalaman kerja	0.035
Bahan baku	0,15	Ketersediaan (menggambarkan <i>networking</i> bahan baku)	0.04
		Harga bahan baku	0.035
		Kesinambungan (menggambarkan <i>networking</i> bahan baku)	0.05
		Mutu bahan baku	0.025
Modal	0,18	Kebutuhan investasi awal	0.045
		Kebutuhan modal kerja	0.075
		Aksesibilitas (menggambarkan <i>networking</i> modal)	0.06
Sarana produksi/usaha	0,12	Ketersediaan	0.06
		Harga	0.02
		Kemudahan	0.04
Teknologi	0,07	Kemudahan	0.025
		Kesiapan penggunaan teknologi	0.045

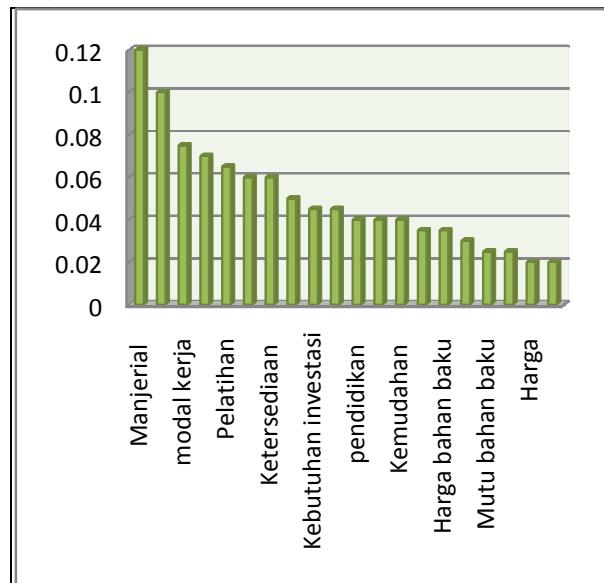
Variabel	Bobot Variabel	Indikator	Bobot Indikator
Manajemen usaha	0,12	kemampuan manjerial	0.12
Ketersediaan pasar	0,10	Jaringan distribusi atau akses pasar	0.1
Harga	0,07	Keleluasaan menetapkan harga yaitu tingkat harga yang bisa diterima pasar, dan marjin harga	0.07
Sumbangan terhadap perekonomian daerah	0,05	<i>Backward dan forward lingakes</i> integrasi vertikal	0.03 0.02

Sumber: data primer yang diolah

Faktor lain yang penting diperhatikan adalah kemampuan manajerial, adanya jaringan distribusi dan akses pasar, keleluasaan menetapkan harga dan masalah keterkaitan antar UKM. Ke empat hal terakhir ini juga tidak dapat dikerjakan sendiri oleh UKM, karena keterbatasannya. Sehingga pemerintah perlu melakukan langkah serius melalui dinas-dinas terkait untuk membuat rencana pengembangan UKM yang lebih komprehensif. Hasil pengurutan dari

faktor yang penting dalam pengembangan UKM dapat dilihat pada Gambar 3.

Pemetaan sektor atau subsektor unggulan di masing-masing distrik dilakukan melalui FGD, *indepth interview* dan kuesioner. Dalam pemetaan sektor atau subsektor unggulan ini sebagian besar sektor (yang relevan) yang menjadi pembentuk PDRB ditawarkan kepada responden, untuk diberi bobot masing-masing.



Gambar 3. Faktor Penting Dalam Pengembangan UKM

Secara umum ke lima distrik yang dipilih sebagai sampel memilih subsektor tanaman pangan sebagai subsektor unggulan, kecuali distrik Nabire memilih sektor perdagangan sebagai sektor unggulan. Meskipun terdapat sedikit perbedaan antar Kabupaten mengenai komoditas unggulan, namun subsektor tanaman pangan menempati peringkat pertama pengembangan. Peringkat kedua

adalah Perkebunan (dipilih oleh distrik Nabire Barat, Wanggar, dan Teluk Kimi). Sedangkan Distrik Uwapa dan Makimi melihat bahwa peternakan memiliki peluang yang lebih besar, dan distrik Nabire memilih sektor Jasa. Bila dilihat secara keseluruhan, pada dasarnya sektor pertanian dalam arti luas masih merupakan sektor dominan di Kabupaten Nabire (Bappeda Nabire, 2011).

Tabel 3. Subsektor Prioritas di Tingkat Kabupaten

PRIORITAS	SUBSEKTOR
1	Perkebunan: Jeruk
2	Perkebunan: Kakao
3	Tanaman Pangan: Padi
4	Tanaman Pangan: Kedelai
5	Industri kecil: Mebel
6	Perdagangan

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil *indepth interview*, kuesioner dan FGD maka diperoleh hal-hal yang menjadi kendala utama pengembangan UKM dan komoditas unggulan di

Kabupaten Nabire yaitu masalah permodalan, manajemen usaha, akses pasar dan ketidakstabilan harga. Masalah-masalah klasik yang dihadapi UKM tersebut selayaknya

mendapatkan perhatian dari pemerintah agar UKM mampu bersaing.

PENUTUP

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro yang meliputi (1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah; dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin.

Demikian pula dengan pengembangan komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Nabire. Pengembangan produk lokal yang memiliki keunggulan harus didorong

agar mampu bersaing dengan produk dari daerah lain. Tentu saja peran pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk mendukung eksistensi UKM agar mampu bersaing di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, U. K. (2011) Pedoman Pelaksanaan SL-PTT 2011. DIRJEN Tanaman Pangan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire. (2010), *Hasil Sensus Penduduk Kabupaten Nabire*. BPS Kabupaten Nabire
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire. (2009), *Kabupaten Nabire dalam Angka 2009*, BPS Kabupaten Nabire.
- Bappeda Kabupaten Nabire (2011), *Pengembangan Komoditas Unggulan UMKM Kabupaten Nabire*, Laporan Penelitian, Bappeda Kabupaten Nabire.
- Departemen Koperasi (2011), *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar*. Departemen Koperasi diakses dari www.depkop.go.id pada tanggal 12 November 2011.
- Dinas Koperindag Kabupaten Nabire. (2010), *Jumlah Koperasi dan UMKM di Kabupaten Nabire*. Dinas Koperindag Kabupaten Nabire.
- FAO. (2009) *The State of Agricultural Commodity Markets*. FAO
- Prihatman, K. (2000), *Sistem Informasi Manajemen Pembangunan di Pedesaan*. BAPPENAS.

